



**PERBANDINGAN PENGGUNAAN SIPD DAN BIPA4 PADA
BIDANG AKUNTANSI DI BPKAD KABUPATEN
BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Oleh:
Tria Yuniar Pratiwi
NIM 230803104023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
2026**



**PERBANDINGAN PENGGUNAAN SIPD DAN BIPA4 PADA
BIDANG AKUNTANSI DI BPKAD KABUPATEN
BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk menyelesaikan Program
Studi D3 Akuntansi dan Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh:
Tria Yuniar Pratiwi
NIM 230803104023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
2026**



***COMPARISON OF THE USE OF SIPD AND BIPA4 IN THE
ACCOUNTING FIELD AT THE BPKAD OF BANYUWANGI
DISTRICT***

REAL WORK PRACTICE REPORT

*Submitted as a Fulfillment Requirement for Completing the Diploma 3
Accounting Program and Obtaining an Associate Degree from the
Faculty of Economics and Business, University of Jember*

By:
Tria Yuniar Pratiwi
NIM 230803104023

***MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE, AND TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF JEMBER
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
D3 ACCOUNTING STUDY PROGRAM
2026***

PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam laporan tugas akhir ini melainkan lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim tugas akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Sembah sujud serta rasa syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikan hambamu kekuatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Cinta pertama dan pintu surgaku, **Ibu dan Alm. Bapak**. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah terputus. Cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan ananda di titik ini. Terima kasih sudah berjuang untukku, semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian hingga melihatku berhasil. Hiduplah lebih lama ya, Ibu.
3. Kepada saudara kandungku yang tak kalah penting kehadirannya **Mas Darmawan**. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti. Berkontribusi mulai dari mahasiswa baru hingga mahasiswa akhir dalam menyelesaikan pendidikan, baik materi, tenaga maupun waktu dan mengusahakan apapun untuk penulis.
4. Kepada adik kandung penulis **Aurel**. Terimakasih atas kerandoman apapun yang telah membuat penulis semangat dan senang, sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada teman seperjuangan D3 Akuntansi sekaligus HIMADITA, terimakasih atas kehadirannya yang selalu menemani dalam suka maupun duka penulis.
6. Kepada gadis manis, diriku sendiri **Tria Yuniar Pratiwi**. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih karena tidak menyerah meski sempat lelah, rapuh, dan putus asa. Terimakasih telah bertanggungjawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. *I'm proud of you*. Untuk langkah-langkah kedepan yang menanti, ingatlah: kamu sudah pernah melewati masa sulit dan kamu bisa.

MOTTO

“Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan pernah mengatakan “seandainya”, tetapi katakan “Qadarullah” karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik, karna Allah itu maha baik”

(Ustadz Hanan Attaki)

“Rasakanlah setiap proses yang kau tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

- BJ Habibie

“Kita tidak akan menang jika kita tidak percaya bahwa kita bisa.”

- Cut Nyak Dien

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Tria Yuniar Pratiwi
NIM : 230803104023
Program Studi : D3 Akuntansi
Judul : Perbandingan Penggunaan SIPD dan BIPA4 pada
Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten
Banyuwangi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa laporan Praktik Kerja Nyata yang saya buat adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2026

Yang menyatakan,

Tria Yuniar Pratiwi

NIM 230803104023

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENJUALAN BARANG BARANG KONSUMSI RUMAH TANGGA PADA UNIT PERTOKOAN KPRI UNIVERSITAS JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Tria Yuniar Pratiwi
N I M : 230803104023
Program Studi : D3 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal :

11 Mei 2026

dan dinyatakan telah memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Dosen Pembimbing

Taufik Kurrohman, SE, MSA, Ak, Ph.D (.....)
NIP. 198207232005011002

Penguji

Penguji 1

Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak (.....)
NIP. 196701021992032002

Penguji

Penguji 2

Bayu Aprillianto, SE, M.Akun (.....)
NIP. 199204052019031018

ABSTRAK

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan aplikasi BIPA4 dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan kedua sistem tersebut memiliki perbedaan dalam implementasi, fitur, fungsi, dan efektivitas sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui peran masing-masing sistem. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPD dan BIPA4, perbedaan fitur dan fungsi, serta efektivitas penggunaannya pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis komparatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah karena terintegrasi secara nasional, sedangkan BIPA4 digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari seperti pengecekan dan pengolahan data. SIPD lebih efektif dalam mendukung penyusunan laporan keuangan, sedangkan BIPA4 lebih efektif dalam mendukung kegiatan operasional. Selain itu, SIPD unggul dalam integrasi sistem dan pelaporan, sementara BIPA4 unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan penggunaan.

Kata Kunci: SIPD, BIPA4, analisis komparatif, efektivitas sistem, BPKAD.

ABSTRACT

The Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) of Banyuwangi Regency uses the Regional Government Information System (SIPD) and the BIPA4 application to support regional financial management. The use of these two systems differs in implementation, features, functions, and effectiveness, requiring analysis to determine the role of each system. This report aims to analyze the implementation of SIPD and BIPA4, the differences in features and functions, and the effectiveness of their use in the Accounting Division of the BPKAD of Banyuwangi Regency. The method used is descriptive qualitative with comparative analysis techniques. Data were obtained through observation, interviews, and documentation during the Real Work Practice. The results show that SIPD is used as the primary system for recording and reporting regional finances due to its national integration, while BIPA4 is used for daily operational activities such as checking and processing data. SIPD is more effective in supporting the preparation of financial reports, while BIPA4 is more effective in supporting operational activities. Furthermore, SIPD excels in system integration and reporting, while BIPA4 excels in flexibility and ease of use.

Keywords: SIPD, BIPA4, comparative analysis, system effectiveness, BPKAD.

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk menganalisis implementasi serta perbandingan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting and Asset Application (BIPA4) dalam pengelolaan keuangan daerah. Fokus penelitian meliputi implementasi sistem, perbedaan fitur dan fungsi, serta tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan kedua sistem tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan Praktik Kerja Nyata. Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan Teknik Analisis Komparatif, yaitu dengan membandingkan penggunaan SIPD dan BIPA4 berdasarkan aspek implementasi, fitur, efektivitas, efisiensi, serta kendala yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah karena memiliki keunggulan dalam integrasi secara sistem nasional. Namun demikian, sistem BIPA4 masih digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dari hasil analisis, diketahui bahwa SIPD lebih efektif dalam mendukung dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan BIPA4 lebih efektif digunakan dalam kegiatan operasional. Namun, penggunaan kedua sistem secara bersamaan menyebabkan adanya duplikasi pekerjaan, sehingga tingkat efisiensi belum optimal.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa SIPD dan BIPA4 memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi penggunaan sistem, peningkatan kemampuan pengguna, serta perbaikan sistem agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil dari pengalaman, pembelajaran, dan pengamatan selama mengikuti kegiatan PKN di kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam mempelajari penerapan sistem SIPD dan BIPA4 dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
2. Moch. Shulthoni, SE., MSA selaku Koordinator Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
3. Taufik Kurrohman, S.E., MSA, Ak. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
4. Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, S.E., MSA, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebut satu persatu karena telah memberikan ilmu kepada penulis
6. Pimpinan dan pegawai kantor BPKAD Banyuwangi serta Pembimbing Lapangan Mbak Elmi dan Mbak Anin yang telah membimbing penulis selama PKN
7. Teman yang selalu siap sedia membantu dan menemani penulis selama perkuliahan, Septa Tri Utami, Az-Zahro Nauriez Ziqih, Nuzula Ghofiy
8. Teman selama magang di BPKAD, Yolanda Panjaitan yang bisa diajak kerjasama dan bertukar pendapat selama di Banyuwangi
9. Teman-teman SMK yang sampai saat ini masih bersama, Putri Ramadhani, Olivia Saputri, dan Rahma Avizah, yang selalu

memberikan dukungan, semangat dan selalu siap mendengarkan cerita apapun penulis

10. Teman seperjuangan D3 Akuntansi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan keluarga besar HIMADITA
11. Teman-teman sependakian yang telah menjadi bagian penting perjalanan penulis tahun ini

Penulis mengharapkan semoga Laporan PKN ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jember, 11 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan PKN.....	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Sistem Informasi Akuntansi	3
2.2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	4
2.3 Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting And Asset Application (BIPA4)	5
2.4 Perbandingan SIPD dengan BIPA4.....	5

BAB 3 METODE PENELITIAN	7
3.1 Objek Penelitian	7
3.2.1 Data Primer	7
3.2.2 Data Sekunder	8
3.2 Teknik Pengumpulan Data	8
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata.....	11
4.1.1 Jadwal Pelaksanaan PKN	11
4.1.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata	11
4.2 Struktur Organisasi Kegiatan Pokok Objek PKN	15
4.3 Landasan Hukum Penggunaan SIPD di BPKAD Kabupaten Banyuwangi	17
4.4 Analisis Komparatif Sistem SIPD dan BIPA4	19
4.4.1 Hasil Observasi Implementasi sistem SIPD di Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwagi	19
4.4.2 Hasil Observasi Implementasi Penggunaan Sistem BIPA4 pada Bidang Akuntansi BPKAD	20
4.5 Efektivitas Sistem SIPD dan BIPA4	21
4.6 Perbandingan Sistem SIPD dan BIPA4.....	22
4.7 Pembahasan Permasalahan.....	25
4.8 Rekomendasi atas Permasalahan.....	26
BAB 5 KESIMPULAN	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN – LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan PKN	11
Tabel 4. 2 Alokasi Kegiatan PKN	13
Tabel 4. 3 Perbandingan Sistem SIPD dan BIPA4.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sub Sistem Informasi Pemerintah Daerah	5
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPKAD Kab. Banyuwangi	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	31
Lampiran 2 Hasil Wawancara	32
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Nyata	36
Lampiran 4 Bukti Sistem	37
Lampiran 5 Laporan Keuangan.....	38
Lampiran 6 <i>Photo Copy</i> Kartu konsultasi dan bimbingan PKN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.	53
Lampiran 7 Bukti Logbook Kegiatan	54

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari (Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014, n.d.) Pasal 391 yang dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Pemeritah Daerah yang digunakan untuk mengelola data pembangunan dan keuangan daaerah secara terintegrasi dan nasional. SIPD mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kewajiban penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam (Permendagri No 77 Tahun 2020, n.d.) tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelum diberlakukannya penggunaan SIPD secara penuh, beberapa pemerintah daerah telah menggunakan sistem pendukung yang dikembangkan atau digunakan secara internal saja, dimana salah satunya pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan sistem BIPA4 (Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting and Asset Application). Meskipun SIPD telah diwajibkan secara nasional, dalam praktiknya sistem BIPA4 masih digunakan secara beriringan dengan SIPD. Namun dengan demikian, penggunaan sistem yang berjalan bersamaan berpotensi menimbulkan tantangan seperti duplikasi pekerjaan, perbedaan format data, dan penyesuaian prosedur kerja.

Sistem informasi yang efektif dan efisien sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Apabila sistem berjalan dengan baik, maka pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan meminimalkan kesalahan. Sebaliknya, jika belum berjalan secara

optimal, dapat mempengaruhi kinerja pegawai, khususnya pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. (Lailatur Rohmah, 2020)

Dilihat dari beberapa kantor lain seperti di BPKAD Kabupaten Jember dan Bondowoso yang hanya menggunakan satu sistem dalam pengelolaan laporan keuangan daerah, yaitu hanya menggunakan sistem SIPD saja. Perbedaan ini juga menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik melakukan Praktik Kerja Nyata di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Perbandingan Penggunaan SIPD dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemilihan judul pada latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan aplikasi BIPA4 (Banyuwangi Intregated Planning, Accrual, Accounting and Asset Application) pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa perbedaan fitur dan fungsi antara SIPD dan BIPA4 dalam mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan daerah?
3. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan kedua sistem tersebut dalam mendukung proses akuntansi?

1.3 Tujuan PKN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan penggunaan SIPD dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui apa saja perbedaan fitur dan fungsi antara SIPD dan BIPA4
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dari kedua sistem tersebut

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut (Dian Pratiwi et al., 2023) Sistem informasi akuntansi (SIA) melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna internal, seperti manajemen dan akuntan, untuk melaporkan informasi kepada pihak eksternal, seperti investor, kreditor, dan otoritas pajak. Sistem Informasi merupakan aturan prosedur formal yang digunakan dalam mengumpulkan data sampai dengan menghasikan informasi serta mendistribusikan nya kepada fihak-fihak yang berkepentingan. (Dr. Lilis Puspitawati, 2021)

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh pihak internal seperti manajemen, tetapi juga oleh pihak eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi. Oleh karena itu, keberadaan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penggunaan sistem seperti SIPD dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi menurut (Saputri et al., 2023)

1. Transparansi dalam Pengumpulan Data Bisnis

Fungsi pertama, SIA berfungsi sebagai media atau wadah untuk mengumpulkan data dan menyimpan berbagai informasi berupa data berkaitan dengan bisnis perusahaan. Proses tersebut dimulai dari menampung data transaksi sesuai dengan dokumen, kemudian mencatat di dalam jurnal sesuai kategorinya. Dan terakhir, mengupload pada menu buku besar secara terstruktur.

2. Sebagai Sistem Pengambilan Keputusan yang Komprehensi Fungsi kedua, sistem informasi akuntansi berperan sebagai penyedia laporan keuangan yang mana menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Di

dalam data tersebut nantinya berisi laporan transaksi pihak perusahaan dan juga akan dilakukan proses evaluasi oleh tim manajemen.

3. Membangun Sistem Pengendalian Internal yang Sistematis

Terakhir, SIA mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Sehingga, laporan ekonomi yang dibuat dapat menyesuaikan aturan dan kebijakan yang berlaku untuk terciptanya aktivitas bisnis efektif dan efisien.

SIA mempercepat alur informasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan akurasi data. Tetapi, tanpa keterampilan pengguna yang memadai, manfaatnya tidak signifikan. Dengan sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan akan semakin baik, karena sistem ini dapat mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Temuan ini didukung oleh penelitian Ningsih dkk. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Jauza Hanun RWH et al., 2025).

2.2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sebuah sistem yang mengelola informasi terkait pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang memiliki hubungan, sehingga memiliki manfaat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Kemendagri 2019). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah amanat dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah dalam suatu sistem yang dikelola secara khusus. Penggunaan SIPD ditegaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Mulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang untuk lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel telah mulai diterapkan oleh pemerintah daerah.



Gambar 2. 1 Sub Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sumber : (Lazuardi et al., 2024)

2.3 Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting And Asset Application (BIPA4)

Sebelum adanya SIPD, BPKAD Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan sistem custom yang disebut *Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting And Asset Application* (BIPAFOUR). Sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah di Banyuwangi, mencakup perencanaan, akuntansi, dan pengelolaan aset. Meskipun SIPD telah diadopsi sebagai sistem utama sejak 2021, BIPAFOUR masih digunakan secara bersamaan dengan SIPD. Pengoperasian dua sistem secara paralel mengharuskan BPKAD untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data, serta memastikan bahwa kedua sistem dapat berfungsi secara efektif. Integrasi antara BIPAFOUR dan SIPD menjadi kebutuhan strategis untuk memaksimalkan manfaat dari kedua sistem, baik dari segi peningkatan efisiensi proses maupun transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (Anam et al., 2025)

2.4 Perbandingan SIPD dengan BIPA4

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai implementasi dan evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian berjudul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan”, (Nasution & M.Si, 2021) menganalisis penerapan SIPD yang diimplementasikan di BPKAD Kota Medan. Hasil dari penelitian

tersebut menunjukkan bahwa SIPD berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, sehingga diperlukan pendampingan serta pelatihan yang berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penggunaan sistem.

Disisi lain, penelitian dari (Muhammad Aldhi Taufikurrahman, 2024) yang berjudul "Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke SIPD (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Banyuwangi)" mengkaji proses transisi dari sistem BIPA4 ke SIPD. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peralihan sistem belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan teknis pada SIPD, khususnya pada modul administrasi yang dinilai kurang fleksibel. Di sisi lain, beberapa proses keuangan masih memerlukan penggunaan sistem BIPA4 sebagai sistem pendukung dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi dan peralihan sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis sistem maupun kesiapan sumber daya manusia. Namun, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis implementasi dan evaluasi peralihan sistem, sehingga belum secara khusus membandingkan efektivitas penggunaan dua sistem secara bersamaan.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan penggunaan SIPD dan BIPA4 berdasarkan indikator efektivitas sistem guna mengetahui sistem mana yang lebih mendukung kinerja akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi merupakan lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 28, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. BPKAD merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPKAD memanfaatkan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi, yaitu SIPD dan BIPA4, sebagai alat bantu dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Penelitian ini berfokus pada perbandingan penggunaan kedua sistem tersebut dalam mendukung efektivitas kerja pegawai, khususnya dalam aspek efektivitas operasional, keakuratan data, kemudahan penggunaan, serta penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, objek penelitian tidak hanya terbatas pada instansi BPKAD sebagai lembaga, tetapi juga pada sistem informasi yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket (Undari Sulung, 2024). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada pegawai pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi yang terlibat langsung dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan BIPA4 yaitu Mbak Anin & Mbak Elmi. Data primer ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana penggunaan kedua sistem tersebut dalam mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, termasuk kendala yang dihadapi serta efektivitas penggunaannya.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain (Undari Sulung, 2024). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dokumen internal BPKAD Kabupaten Banyuwangi yang mendukung penelitian, seperti Laporan Keuangan Daerah dari dua sistem yang digunakan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai perbandingan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan BIPA4 di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian proses penggunaan SIPD dan BIPA4 dalam kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan pegawai Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan SIPD dan BIPA4 dalam pelaksanaan tugasnya. Wawancara dilakukan secara terstruktur berdasarkan indikator penelitian, seperti efisiensi operasional, keakuratan data, kemudahan penggunaan sistem, dan dukungan terhadap penggunaan laporan keuangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan penggunaan SIPD dan BIPA4, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman teknis sistem, laporan keuangan daerah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dokumentasi ini

digunakan untuk mendukung analisis perbandingan kedua sistem dan dilakukan selama melakukan praktik kerja nyata. (Dr. Zainuddin Iba, 2023)

3.4 Teknik Analisis Data

Penulisan laporan praktik kerja nyata ini menggunakan metode deskriptif atau deskripsi komparatif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek, aktivitas, karakteristik, dan hubungan kemudian mencari solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan cara mendeskripsikan karakteristik masing-masing sistem, kemudian membandingkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan BIPA4 berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kemudahan penggunaan, serta kendala yang dihadapi. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai sistem yang lebih optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Penulis melakukan analisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kegiatan penggunaan SIPD dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan memfokuskan data hasil wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Data yang dipilih berkaitan dengan Prosedur penggunaan sistem, Efektivitas sistem dalam penyusunan laporan, Efisiensi waktu kerja, Kemudahan penggunaan sistem, serta Kendala yang dihadapi oleh user. Data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian akan disisihkan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi selesai, dengan menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel perbandingan. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap perbedaan antara SIPD dan BIPA4.

4. Analisis Komparatif

Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan kedua sistem berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi dan menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan kedua sistem tersebut dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Hasil perbandingan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang telah diperoleh dari lapangan selama masa praktik.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis komparatif yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan gambaran mengenai sistem yang lebih efektif atau memiliki keunggulan tertentu.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata merupakan mata kuliah terakhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dalam program studi D3 Akuntansi Universitas Jember. Praktik Kerja Nyata (PKN) ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang telah di dapat semasa perkuliahan, mulai dari semester satu hingga semester lima. Dalam hal ini penulis melaksanakan kegiatan praktik kerja nyata di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi pada Bidang Akuntansi.

4.1.1 Jadwal Pelaksanaan PKN

Praktik kerja nyata dimulai pada tanggal 02 Februari 2026 dan berakhir pada tanggal 24 April 2026 di Kantor BPKAD Banyuwangi. Kantor BPKAD menerapkan sistem lima hari kerja, libur di hari Jum'at-Sabtu, hari besar dan cuti bersama. Pada siang hari terdapat jam istirahat yakni selama 1 jam dimulai pukul 12.00-13.00 WIB.

Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan PKN

Hari	Jam Kerja	Hari x Jam Kerja	Total
Senin – Jum'at	08.00 – 12.00 13.00 – 17.00	51 hari x 8 jam	408 jam
	TOTAL		408 jam

4.1.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata

Kegiatan praktik kerja nyata yang dilaksanakan di Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi berkaitan langsung dengan penelitian perbandingan penggunaan SIPD dan BIPA4 dalam pengelolaan keuangan daerah. Selama pelaksanaan PKN, penulis melakukan observasi terhadap proses pencatatan transaksi keuangan daerah serta penyusunan laporan keuangan yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang berlaku di BPKAD yaitu SIPD dan BIPA4.

Selain melakukan observasi, penulis juga mempelajari alur penggunaan sistem SIPD dan BIPA4 dalam mendukung proses akuntansi pemerintahan daerah, mulai dari input data transaksi, posting jurnal, pengecekan laporan keuangan daerah seperti IRA, LO dan CALK, hingga penyusunan laporan keuangan daerah. Selama pelaksanaan praktik kerja nyata penulis juga membantu fasilitator skpd BPKAD dalam mencari selisih perhitungan antara dua sistem yaitu pada sistem SIPD dan BIPA4. Kegiatan penulis selama pelaksanaan praktik kerja nyata di bidang akuntansi meliputi:

1. Melakukan Pengecekan Kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran yang Dihasilkan Oleh Sistem SIPD dan BIPA4

Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh kedua sistem tersebut sesuai dan dapat digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian data, ketepatan pencatatan transaksi, serta melihat adanya perbedaan atau ketidaksesuaian informasi keuangan yang dihasilkan oleh kedua sistem tersebut.

2. Melakukan Pengecekan serta Perhitungan Ulang Terhadap Beberapa Informasi yang Tercantum dalam CALK

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menelaah data perhitungan dan informasi yang terdapat dalam CaLK. Selain itu, dilakukan pula proses perhitungan ulang terhadap angka yang disajikan untuk memastikan bahwa informasi yang dicantumkan telah sesuai dengan data keuangan yang sebenarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan, konsistensi, serta kesesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

3. Posting Jurnal pada sistem SIPD dengan Mengidentifikasi Selisih Data dari BIPA4

Proses posting jurnal pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan terlebih dahulu mengidentifikasi selisih data yang

terdapat pada sistem BIPA4. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membandingkan data transaksi keuangan yang terdapat pada kedua sistem tersebut untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai atau ketidaksesuaian pencatatan. Proses ini dilakukan dengan melihat laporan realisasi anggaran pada sistem BIPA4 yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengecekan data pada sistem SIPD. Apabila ditemukan adanya selisih atau perbedaan nilai pada laporan realisasi anggaran, maka dilakukan penyesuaian melalui proses posting jurnal pada sistem SIPD.

4. Rekapitulasi Buku Besar Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOSP per SKPD untuk Keperluan Audit

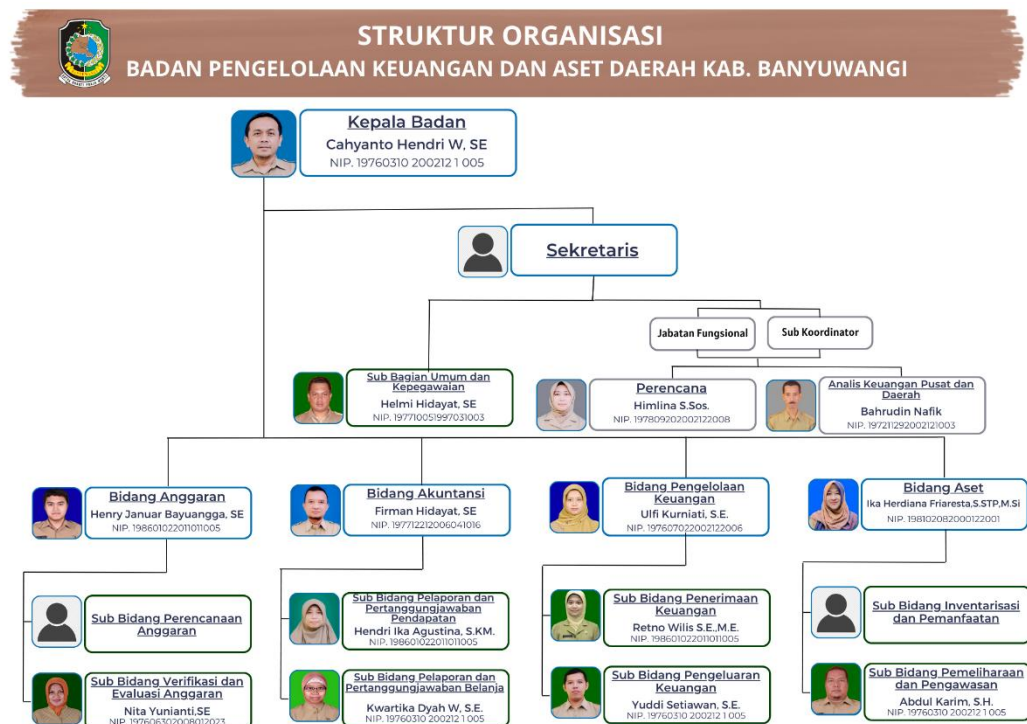
Melakukan rekapitulasi buku besar Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) berdasarkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan serta mengelompokkan data transaksi keuangan yang tercatat dalam buku besar terkait penggunaan dana DAK Nonfisik BOSP. Proses rekapitulasi dilakukan dengan cara memisahkan data buku besar berdasarkan SKPD sehingga setiap SKPD memiliki file laporan tersendiri. Pemisahan file tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pemeriksaan serta penelusuran data oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4. 2 Alokasi Kegiatan PKN

No.	Kegiatan Praktik kerja Nyata	Minggu Ke												Jumlah Jam
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pengenalan Lingkungan Kantor dan seksi bidang akuntansi	■	■											6 Jam
2	Melakukan Perhitungan Ulang CaLK	■						■					■	24 Jam
3	Menghitung Buku Besar DAK Nonfisik		■			■	■	■					■	40 Jam
4	Mengumpulkan data sekolah SD & SMP dari sistem BIPA4			■							■			16 Jam

No.	Kegiatan Praktik kerja Nyata	Minggu Ke												Jumlah Jam
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	Melakukan pengumpulan dan pengolahan dokumen keuangan daerah sebagai data pendukung penelitian													16 Jam
Total													408 jam	

4.2 Struktur Organisasi Kegiatan Pokok Objek PKN



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPKAD Kab. Banyuwangi

Sumber: BPKAD Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah *Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten*. Selain tugas utama BPKAD juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing bidang yang merujuk pada tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol, penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan, pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor, pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan, penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah lain dan hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja badan dan surat menyurat, pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) badan, pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI).
2. Bidang Anggaran memiliki tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah, melakukan penyusunan laporan di bidang anggaran daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya, penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan dan

pertanggungjawaban, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD, penyusunan laporan di bidang anggaran daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan Keuangan memiliki tugas dalam membukukan serta meneliti berkas-berkas dan bukti penerimaan, melakukan proses dan mekanisme pengeluaran, melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah, melaksanakan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran, melakukan pendokumentasian pembukuan dan laporan, melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap system dan mekanisme pelaksanaan.
4. Bidang Akuntansi memiliki tugas melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah, mengidentifikasi, mengukur, mencatat pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang akuntansi, melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Bidang Aset memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan aset daerah termasuk inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pemeriksaan, penghapusan dan keamanan aset daerah, penyusunan rencana pengelolaan aset daerah, Pengumpulan dan pengelolaan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah, pengadministrasian aset daerah, pelaksanaan inventarisasi aset daerah, pemeliharaan dan keamanan aset daerah yang belum dikelola SKPD, pemeriksaan dan pengawasan aset daerah, penghapusan aset daerah, pelaporan barang inventarisasi daerah.

4.3 Landasan Hukum Penggunaan SIPD di BPKAD Kabupaten Banyuwangi

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa landasan hukum penggunaan SIPD di

BPKAD Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah, yang mengatur bahwa SIPD merupakan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan lainnya yang terintegrasi secara nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah. SIPD menjadi salah satu sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

4.4 Analisis Komparatif Sistem SIPD dan BIPA4

4.4.1 Hasil Observasi Implementasi sistem SIPD di Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi, implementasi sistem SIPD telah digunakan sebagai sistem utama dalam mendukung proses pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan daerah. SIPD dimanfaatkan untuk melakukan proses input transaksi keuangan yang berasal dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Data transaksi tersebut kemudian diinput dan diproses dalam sistem modul akuntansi yang tersedia sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Penggunaan SIPD ini merupakan bentuk penerapan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata, penulis terlibat langsung dalam penggunaan SIPD, salah satunya adalah melakukan proses posting jurnal transaksi untuk beberapa SKPD dalam sistem. Kegiatan tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan kesesuaian data transaksi yang terdapat dalam sistem SIPD dan BIPA4.

Selama kegiatan PKN, penulis melakukan pengamatan dengan melibatkan dua pegawai bidang akuntansi yaitu kepada pembimbing lapangan dan juga fasilitator di bidang akuntansi. Hasil dari observasi yang telah dilakukan terkait SIPD yaitu SIPD memiliki keunggulan dalam hal integrasi data serta kemampuannya dalam menghasilkan laporan keuangan daerah secara terstandarisasi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti halnya sistem yang sering error atau gangguan pada saat digunakan. Hal ini disebabkan ketika semua OPD di setiap daerah menggunakan sistem secara bersamaan untuk kegiatan operasional kantor. Oleh karena itu, dalam kondisi ini sistem BIPA4 digunakan secara alternatif sementara agar proses pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan.

Ditinjau dari aspek efektivitas, penggunaan SIPD dinilai cukup efektif dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan daerah karena sistem ini mampu mengintegrasikan data keuangan dari berbagai SKPD dalam satu platform yang terpusat. Hal ini dapat mempermudah proses penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun jika dari sisi efisiensi, penggunaan SIPD masih menghadapi beberapa kendala, seperti server error, beberapa pegawai yang masih belum sepenuhnya paham terkait implementasi dikarenakan modul yang digunakan di SIPD berbeda dengan sistem internal yang sudah lama digunakan oleh BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi telah berjalan sebagai sistem utama secara efektif dalam mendukung pengelolaan maupun penyusunan laporan keuangan daerah, namun masih memerlukan dukungan dari sistem lain serta penyesuaian penggunaannya agar dapat berjalan secara lebih optimal.

4.4.2 Hasil Observasi Implementasi Penggunaan Sistem BIPA4 pada Bidang Akuntansi BPKAD

Selain sistem SIPD, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi juga masih menggunakan sistem BIPA4 sebagai sistem pendukung dalam proses pengolahan data keuangan daerah. Sistem BIPA4 merupakan sistem internal yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membantu proses pengelolaan, perencanaan, pencatatan akuntansi, serta pengelolaan aset daerah. Sistem daerah ini tetap digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meskipun SIPD telah digunakan sebagai sistem utama sejak tahun 2021.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata, sistem BIPA4 masih digunakan secara beriringan dengan SIPD dalam kegiatan operasional pada Bidang Akuntansi, seluruh kegiatan masih menggunakan sistem BIPA4 salah satunya dalam proses pengecekan data transaksi keuangan sebagai sistem pendukung dalam beberapa proses pengolahan data keuangan daerah. Laporan keuangan dari kedua sistem nantinya akan di bandingkan untuk memastikan kesesuaian data antara kedua sistem tersebut dengan memastikan bahwa data laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kesesuaian serta tidak

terdapat perbedaan yang signifikan.

Sistem BIPA4 lebih sering digunakan oleh pegawai BPKAD dalam semua kegiatan operasional dikarenakan modul yang digunakan sangat familiar, kemudahan input transaksi dan juga dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pegawai kantor BPKAD. Berdasarkan hasil observasi dengan beberapa pegawai di bidang akuntansi, dapat disimpulkan bahwa sistem BIPA4 ini lebih fleksibel digunakan untuk melakukan kegiatan operasional dikarenakan sistem BIPA4 ini telah lama digunakan oleh pegawai sebelum ditetapkan penggunaan SIPD secara nasional. Selain itu jika terdapat kendala pada sistem ini, pegawai BPKAD bisa langsung konfirmasi kepada kominfo untuk dilakukan pengecekan server yang sedang bermasalah atau terjadi sistem error.

4.5 Efektivitas Sistem SIPD dan BIPA4

Berdasarkan hasil observasi dibidang akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan aplikasi BIPA4 dinilai memiliki efektivitas yang berbeda dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan daerah karena memiliki sistem yang terintegrasi antar SKPD serta sesuai dengan standar pemerintah pusat. Dengan adanya integrasi tersebut, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih terarah dan terstandarisasi.

Namun demikian, efektivitas penggunaan SIPD masih belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala berupa gangguan sistem atau error yang dapat menghambat proses penginputan data. Dalam kondisi tersebut, BIPA4 masih digunakan sebagai sistem pendukung agar kegiatan operasional tetap dapat berjalan. Penggunaan kedua sistem secara bersamaan menyebabkan adanya pengecekan ulang data dan duplikasi pekerjaan sehingga efisiensi kerja belum optimal.

Sementara itu, BIPA4 digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, biasanya digunakan dalam proses pengecekan, pengolahan, dan verifikasi data keuangan. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan BIPA4 dinilai lebih mudah dipahami oleh seluruh OPD di Kabupaten Banyuwangi karena telah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga pengguna lebih familiar terhadap

sistem tersebut. Selain itu, proses penginputan dan pengolahan data menggunakan BIPA4 dinilai lebih cepat sehingga membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan.

4.6 Perbandingan Sistem SIPD dan BIPA4

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem BIPA4 memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam mendukung proses pencatatan serta pelaporan keuangan daerah. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti pengembang sistem, fitur dan fungsi utama, serta peran dalam pengelolaan keuangan daerah.

SIPD merupakan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan digunakan secara nasional oleh seluruh pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data pemerintahan daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. SIPD dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah secara nasional sehingga data yang dihasilkan dapat terstandarisasi dan terintegrasi dengan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya di BPKAD Kabupaten Banyuwangi, SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam proses pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan daerah. Penggunaan sistem SIPD tidak selalu berjalan dengan optimal, seperti ketika SIPD mengalami gangguan atau error, maka proses penginputan data transaksi keuangan tidak dapat dilakukan secara langsung melalui sistem tersebut. Dalam kondisi demikian, pegawai biasanya melakukan penginputan data melalui sistem BIPA4 sebagai alternatif sementara.

Penggunaan sistem BIPA4 sebagai sistem alternatif ini bertujuan untuk menjaga kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah agar tidak terhambat oleh kendala teknis pada sistem SIPD. Data yang telah diinput melalui sistem BIPA4 kemudian akan disesuaikan kembali dengan sistem SIPD setelah sistem tersebut kembali berfungsi dengan normal. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa sistem BIPA4 masih memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional, terutama dalam kondisi tertentu. SIPD tetap digunakan sebagai sistem utama,

sedangkan BIPA4 digunakan sebagai sistem pendukung. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan antara kedua sistem tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan antara sistem SIPD dan BIPA4:

Tabel 4. 3 Perbandingan Sistem SIPD dan BIPA4

No.	Aspek Penilaian	Sistem Informasi Akuntansi		Analisis Komparatif
		SIPD	BIPA4	
1.	Implementasi sistem	Digunakan sebagai sistem utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat	Digunakan sebagai sistem pendukung / alternatif dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah	SIPD menjadi sistem utama sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan BIPA4 berperan sebagai sistem pendukung
2.	Fitur sistem	Terintegrasi dengan modul keuangan pemerintah pusat	Memiliki fitur yang lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan daerah	SIPD unggul dalam integrasi, BIPA4 unggul dalam penyesuaian dan modul yang lengkap
3.	Fungsi sistem	Mendukung seluruh proses pengelolaan daerah tetapi masih butuh penyesuaian	Mendukung seluruh proses pengelolaan daerah	Kedua sistem memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan daerah

No.	Aspek Penilaian	Sistem Informasi Akuntansi		Analisis Komparatif
		SIPD	BIPA4	
4.	Fleksibilitas sistem	Terbatas (mengikuti aturan pusat)	Lebih fleksibel	BIPA4 lebih fleksibel dalam penyesuaian kebutuhan operasional
5.	Efektivitas sistem	Efektif dalam dalam pelaporan keuangan yang terintegrasi	Efektif dalam kegiatan operasional serta sebagai alternatif saat SIPD sering error	SIPD unggul dalam efektivitas pelaporan, sedangkan BIPA4 efektif dalam mendukung operasional sehari-hari.
6.	Kendala sistem	Sering mengalami sistem error atau gangguan server yang menghambat proses posting dan penginputan data	Tidak terintegrasi secara nasional / terbatas pada lingkup daerah	SIPD memiliki kendala teknis, sedangkan BIPA4 memiliki keterbatasan dalam integrasi sistem

Berdasarkan hasil dari analisis komparatif pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem BIPA4 pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan yang cukup signifikan seperti modul yang digunakan disetiap sistem, jika di SIPD modul yang bisa diakses hanya modul untuk bidang akuntansi, sedangkan di sistem BIPA4 modul yang bisa diakses semua mulai dari penatausahaan, anggaran, akuntansi dan juga bagian aset.

SIPD memiliki keunggulan dalam integrasi langsung dengan pusat serta kemampuannya dalam menghasilkan laporan keuangan secara terstandarisasi, namun memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi sehingga sering mengalami

kendala teknis dikarenakan yang menggunakan sistem tersebut seluruh pemerintahan di Indonesia. Sementara itu, sistem BIPA4 memiliki keunggulan dalam kemudahan penggunaan dan fleksibilitas sistem, sehingga lebih efektif digunakan dalam mendukung kegiatan operasional kantor serta sebagai alternatif ketika SIPD mengalami gangguan sistem.

Dengan demikian, kedua sistem tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

4.7 Pembahasan Permasalahan

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara dan hasil analisis komparatif yang telah dilakukan pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi, penggunaan Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem BIPA4 menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dalam mendukung proses pengelolaan keuangan daerah. Kedua sistem tersebut digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, sehingga memiliki peran yang saling melengkapi dalam penggunaannya. Adapun beberapa permasalahan yang dapat dilihat selama penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata, yakni :

1. Seluruh OPD yang ada di Kabupaten Banyuwangi kurang paham dalam menggunakan SIPD secara penuh
Pemahaman pengguna terhadap penggunaan SIPD pada seluruh OPD di Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal sehingga dalam pelaksanaannya masih diperlukan pendampingan dan penyesuaian dalam pengoperasian sistem.
2. Gangguan sistem pada SIPD
SIPD masih sering mengalami gangguan sistem atau error yang menyebabkan proses penginputan, pengolahan, dan pencatatan data keuangan menjadi terhambat. Kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara maksimal.
3. Keterbatasan sistem BIPA4
Sistem BIPA4 belum terintegrasi secara nasional dan tidak terintegrasi juga dengan sistem SIPD sehingga penggunaannya masih terbatas pada lingkup daerah. Selain itu, beberapa komponen laporan keuangan

pada BIPA4 belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan standar pelaporan pemerintah daerah.

4. Duplikasi Pekerjaan antara Sistem SIPD dan BIPA4

Penggunaan SIPD dan BIPA4 secara bersamaan menyebabkan adanya duplikasi pekerjaan dan penyesuaian data antara dua sistem karena BIPA4 tidak terintegrasi dengan sistem SIPD.

4.8 Rekomendasi atas Permasalahan

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah diidentifikasi pada pembahasan sebelumnya, maka diperlukan beberapa rekomendasi yang dapat mendukung optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui pelatihan dan pendampingan secara berkala. Hal ini sesuai dengan teori sistem informasi akuntansi dalam Bab II yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem yang digunakan tersebut (*perceived ease of use*). Dengan adanya peningkatan pemahaman pengguna, diharapkan kendala dalam penggunaan SIPD dapat diminimalkan.
2. Peningkatan koordinasi dengan pihak pengelola SIPD di tingkat pusat terkait dengan penanganan kendala teknis seperti sering terjadi sistem error atau gangguan sistem. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan stabilitas sistem sehingga proses pencatatan dan pelaporan keuangan daerah dapat berjalan secara lebih lancar. Rekomendasi ini sejalan dengan konsep kualitas sistem (*system quality*) dalam teori sistem informasi yang menekankan pentingnya kendala sistem.
3. Pemanfaatan sistem BIPA4 sebagai sistem pendukung secara terkontrol, khususnya dalam kondisi tertentu seperti ketika sistem SIPD mengalami gangguan. Akan tetapi, perlu dilakukan pengembangan dan integrasi sistem BIPA4 dengan SIPD agar proses pengelolaan keuangan dan sinkronasi data

keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan terjadinya selisih data laporan keuangan antara dua sistem.

4. Peningkatan Koordinasi dan Rekonsiliasi Data

Perlu dilakukan pengecekan dan rekonsiliasi data secara berkala antara sistem SIPD dan BIPA4 untuk meminimalkan selisih data serta mengurangi duplikasi pekerjaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya rekomendasi diatas, diharapkan implementasi sistem SIPD dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan secara optimal serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB 5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari observasi dan analisis selama Praktik Kerja Nyata dilakukan pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi SIPD dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara bersamaan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan daerah karena telah terintegrasi secara nasional sesuai ketentuan pemerintah pusat. Sementara itu, BIPA4 digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari seperti pengecekan, pengolahan, dan verifikasi data keuangan.
2. Berdasarkan hasil analisis komparatif, SIPD dan BIPA4 memiliki perbedaan fitur dan fungsi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Dari segi fitur dan fungsi, SIPD lebih difokuskan setiap pegawai hanya bisa login sesuai dengan bidang pekerjaannya, seperti di akuntansi, anggaran, pengelolaan, dan aset. Sedangkan BIPA4 semua pegawai dapat mengakses semua fitur dalam satu sistem.
3. Berdasarkan hasil analisis komparatif, SIPD dan BIPA4 memiliki tingkat efektivitas yang berbeda sesuai dengan fungsi penggunaannya. SIPD lebih efektif dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah karena sistem telah terintegrasi antar SKPD dan sesuai standar pemerintah pusat. Sedangkan BIPA4 lebih efektif dalam mendukung kegiatan operasional karena lebih mudah digunakan dan membantu mempercepat proses pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. S., Sabil, A., & Shafa, A. (2025). Analisis Kinerja Sistem BIPAFour dan SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan User Acceptance Di BPKAD Banyuwangi. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 846–853.
- Dian Pratiwi, A., Joseph Philip Kambey, M., & Florence Moroki, M. O. (2023). *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Dr. Lilis Puspitawati, SE. , M. SI. , A. C. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Dr. Zainuddin Iba, S. E. , M. M. A. W. (2023). *Metode Penelitian*.
- Jauza Hanun RWH, R., Sri Widiawati, H., Kurniawan, A., Sumber Daya Manusia Kualitas Laporan Keuangan, K., & Jauza Hanun Raras Widowati Hapsari, R. (2025). Jurnal Akuntansi dan Manajemen Peran Standar Akuntansi, Sistem Informasi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 4, Number 3).
- Kemendagri 2019*. (n.d.).
- Lailatur Rohmah, N. S. A. dan A. F. K. S. (2020). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang*.
- Lazuardi, A., Prasetyaning Pawestri, H., Ekonomi, F., & Widayagama Malang, U. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. *JURNAL MANEKSI*, 13(3).
- Muhammad Aldhi Taufikurrahman. (2024). *Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPAA ke SIPD (Studi kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi)*.

Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019. (n.d.).

Permendagri No 77 Tahun 2020. (n.d.).

Saputri, H., Kusnaedi, U., & Asmana, Y. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Jasa di Jakarta Utara. *Haria Saputri, Dkk) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 102(4), 2986–6340.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014. (n.d.).

Undari Sulung, M. M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier.*

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

- A. Kepada Pegawai BPKAD Kabupaten Banyuwangi Bidang Akuntansi
 1. Bagaimana implementasi SIPD pada Bidang Akuntansi BPKAD dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah?
 2. Apakah penggunaan SIPD tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
 3. Apakah sistem BIPA4 dan SIPD digunakan secara bersamaan dalam kegiatan sehari-hari? Jika iya, bagaimana ya mbak alur penggunaannya?
 4. Apakah ada perbedaan antara sistem BIPA4 dan SIPD mbak?
- B. Kepada Fasilitator BPKAD Kabupaten Banyuwangi Bidang Akuntansi (Mbak Anindya)
 1. Apakah penggunaan SIPD sudah efektif dalam mendukung penyusunan laporan keuangan?
 2. Bagaimana efektivitas penggunaan sistem BIPA4 dalam mendukung kegiatan operasional kantor?
 3. Sistem mana yang lebih efisien dalam pengelolaan keuangan daerah?
 4. Apa saja kendala yang sering terjadi antara dua sistem ketika digunakan? dan solusinya apa?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

A. Pegawai BPKAD Kabupaten Banyuwangi Bidang Akuntansi (Mbak Elmi)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Elmi di Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Banyuwangi

Penulis: “Bagaimana implementasi SIPD pada Bidang Akuntansi BPKAD dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah?”

Mbak Elmi: “SIPD saat ini sudah digunakan sebagai sistem utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah, mulai dari input transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Tapi BIPA4 juga masih digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, terutama dalam membantu pengecekan data dan pengolahan informasi keuangan. Jadi di BPKAD ini masih menggunakan dua sistem secara bersamaan, karena SIPD sama BIPA4 ini sistem yang saling melengkapi.”

Penulis: “Apakah penggunaan SIPD tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019?”

Mbak Elmi: “Sudah sesuai dan mengikuti peraturan sejak ditetapkannya Permendagri bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem SIPD karena sudah terintegrasi langsung dengan pusat dan digunakan sebagai sistem utama sejak 2021. Namun SIPD masih belum optimal penggunaannya karena kita masih butuh pendekatan atau pemahaman lebih terkait penggunaan sistem SIPD, sistem SIPD sangat berbeda dengan sistem BIPA4 yang sudah lama digunakan sebelum diterapkannya SIPD, dan SIPD ini masih sering mengalami gangguan sistem.”

Penulis: “Apakah sistem BIPA4 dan SIPD digunakan secara bersamaan dalam kegiatan sehari-hari? Jika iya, bagaimana ya mbak alur penggunaannya?”

Mbak Elmi: “Iya masih, karena kan SIPD ini masih sering terjadi gangguan sistem dan digunakan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia yang akses. BIPA4 digunakan sebagai alternatif ketika SIPD error. Modul BIPA4 juga sangat mudah digunakan karena lebih lama digunakan di sini. Alur penggunaannya biasanya penginputan transaksi dulu di sistem SIPD, nah

kalau terjadi error seperti contoh waktu tahun lalu ketika mau tutup buku itu harus melakukan pembayaran, SIPD error karena banyak nya yang mengakses, jadi dialihkan menggunakan sistem BIPA4.”

Penulis: “Apakah ada perbedaan antara sistem BIPA4 dan SIPD mbak?”

Mbak Elmi: “Banyak perbedaan antara sistem SIPD dan BIPA4, contohnya di modul utama, kalo di SIPD yang bisa mengakses hanya yang punya NIP dan hanya Bidang Akuntansi aja, nah sedangkan BIPA4 semua modul dapat di akses dengan semua pegawai, seperti milik penatausahaan, anggaran hingga bidang aset. Jadi jika ada info yang ingin dirubah di BIPA4 itu semua bisa membantu. Fitur di SIPD juga sangat berbeda dengan BIPA4, maka harus dilakukan pemahaman lebih untuk dapat mengakses nya.”

B. Fasilitator BPKAD Kabupaten Banyuwangi Bidang Akuntansi (Mbak Anindya)

Penulis: “Apakah penggunaan SIPD sudah efektif dalam mendukung penyusunan laporan keuangan?”

Mbak Anindya: “SIPD sudah cukup efektif dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah, dikarenakan SIPD sudah terintegrasi dengan pusat, seperti data dari berbagai SKPD sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan terpusat. Terkait efektivitas masih belum sepenuhnya optimal karena masih sering terjadi kendala dalam penggunaan sistem, seperti error atau gangguan yang dapat menghambat proses kerja. Selain itu kita masih harus sering melakukan pengecekan data menggunakan sistem BIPA4 guna memastikan keakuratan data, karena jika SIPD tidak diakses maka pekerjaan dialihkan dengan menggunakan sistem BIPA4.”

Penulis: “Bagaimana efektivitas penggunaan sistem BIPA4 dalam mendukung kegiatan operasional kantor?”

Mbak Anindya: “Penggunaan sistem BIPA4 cukup efektif dalam melakukan kegiatan operasional di Bidang Akuntansi, karena sistem ini mudah digunakan dan sudah familiar bagi para pegawai, sehingga dapat mempermudah dalam proses pencatatan, pengolahan, dan pengecekan

data keuangan. Fitur dan modul yang ada di BIPA4 juga dapat diakses dalam satu sistem. Misal kita butuh data dari Bidang Anggaran jadi kita bisa akses langsung di modul Anggaran.

Penulis: “Sistem mana yang lebih efisien dalam pengelolaan keuangan daerah?”

Mbak Anindya: “Jika dilihat dari sisi sistem, SIPD lebih efisien karena sudah terintegrasi secara nasional, sehingga dapat langsung digunakan untuk penyusunan laporan keuangan daerah. Proses pelaporannya menjadi lebih terstruktur dan tidak perlu dilakukan secara terpisah. Jika dilihat dari praktik sehari-hari, sistem BIPA4 justru dirasa lebih efisien karena lebih mudah penggunaannya, selain itu proses pengolahan data di sistem BIPA4 cenderung lebih cepat, terutama untuk kegiatan operasional. Para pegawai juga sudah terbiasa dan familiar dalam menggunakan fitur-fitur di sistem BIPA4, sehingga tidak perlu penyesuaian dalam penggunaannya. SIPD juga lebih efisien dalam jangka panjang karena mampu mengintegrasikan seluruh data keuangan secara terpusat, namun dalam praktiknya efisiensi SIPD masih belum atau kurang optimal karena adanya kendala teknis. Maka dari itu sistem BIPA4 masih digunakan untuk mendukung sistem SIPD. Kesimpulannya sistem BIPA4 itu efisien ketika digunakan dalam sehari-hari, sedangkan SIPD lebih efisien dalam hal integrasi dan pelaporan keuangan secara menyeluruh. Penggunaan kedua sistem secara bersamaan menunjukkan bahwa efisiensi kerja masih perlu ditingkatkan.”

Penulis: “Apa saja kendala yang sering terjadi antara dua sistem ketika digunakan? dan solusinya apa?”

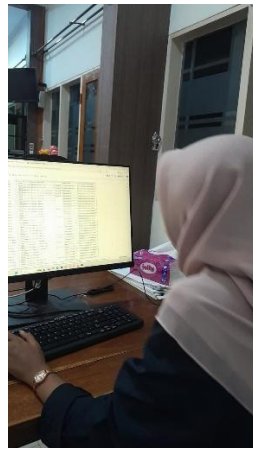
Mbak Anindya: “Kendala yang sering terjadi ketika sistem BIPA4 dan SIPD digunakan secara bersamaan yaitu ketika ada perbedaan data atau selisih antara kedua sistem, sehingga perlu adanya pengecekan ulang. Misal ketika kita cek laporan keuangan RSUD Genteng dari sistem BIPA4 dan SIPD dan terdapat selisih, maka kita harus cari apa yang membuat terjadi selisih data, setelah ketemu ternyata hanya berbeda di nama akun. Kalo di BIPA4 itu 2 akun jadi satu, sedangkan di SIPD ternyata akunnya itu dirinci jadi dua subjek. Kendala lainnya kita harus duplikasi pekerjaan

karena data harus kita cek kembali menggunakan BIPA4 untuk memastikan keakuratan ketika kita input di sistem SIPD. Hal ini yang menyebabkan proses kerja menjadi lebih lama dan kurang efisien. Langkah yang dilakukan kita biasanya melakukan rekonsiliasi atau pengecekan secara berkala antara SIPD dan BIPA4 untuk meminimalisir selisih data. Ketika SIPD mengalami gangguan, maka dari penginputan data, terutama pemabayaran seperti tahun lalu, dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan BIPA4 agar kegiatan operasional tetap berjalan. Setelah sistem SIPD kembali normal, data tersebut kemudian disesuaikan kembali agar tetap sinkron antara kedua sistem.”

Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Nyata



Gambar 5. 1 Melakukan Pengecekan CALK Antara Sistem SIPD dan BIPA4

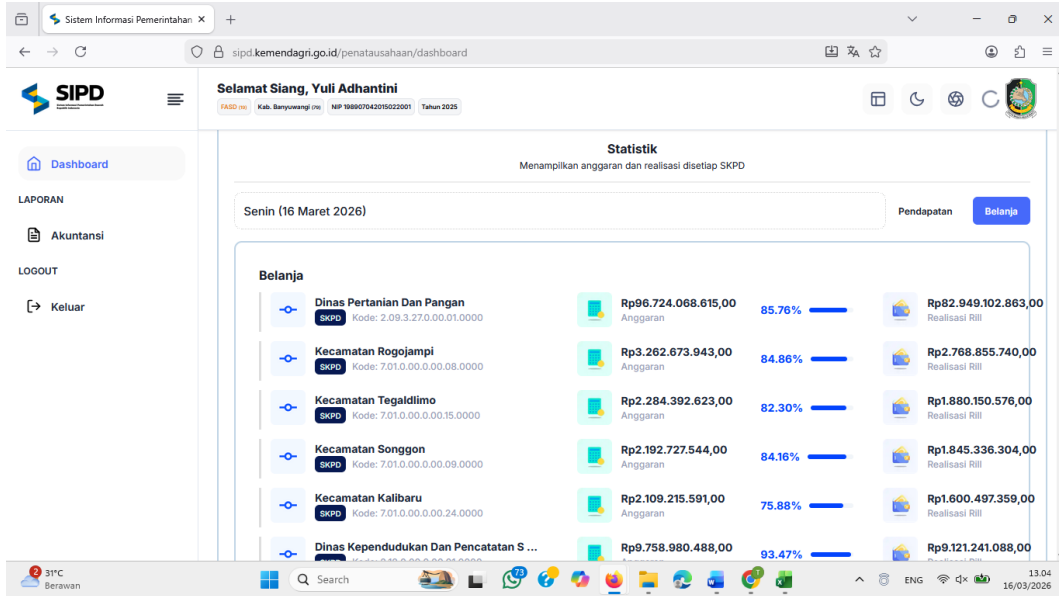


Gambar 5. 2 Menginput data pembayaran utang obat rumah sakit

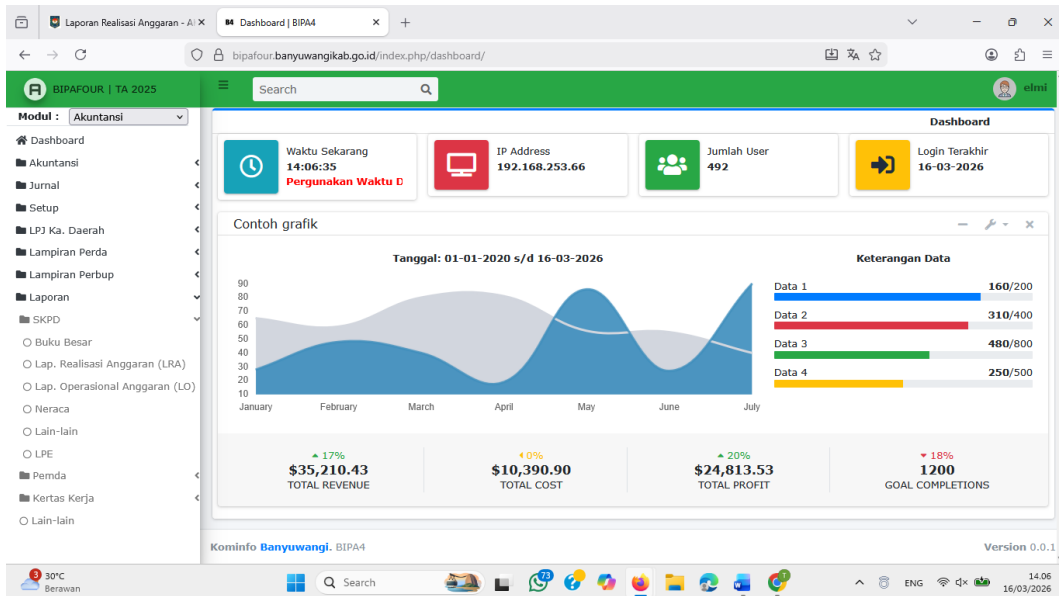


Gambar 5. 3 Melakukan identifikasi selisih LRA Belanja dan Pendapatan

Lampiran 4 Bukti Sistem



Gambar 6. 1 Menu Utama Sistem SIPD



Gambar 6. 2 Menu Utama Sistem BIPAF4

Lampiran 5 Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran SIPD



PEMERINTAHAN KAB. BANYUWANGI
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
 TAHUN ANGGARAN 2025
 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.511.596.425.162,00	3.404.434.284.304,00	96,94	3.370.197.648.622,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	740.306.550.833,00	653.453.525.663,03	88,26	597.415.024.061,76
4.1.01	Pajak Daerah	375.065.550.833,00	342.893.362.005,00	91,41	298.505.386.787,00
4.1.02	Retribusi Daerah	305.954.314.200,00	273.316.793.780,66	89,33	263.834.147.084,10
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.950.000.000,00	24.945.876.115,94	99,98	23.774.290.840,03
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	34.336.685.800,00	12.307.493.761,43	35,84	11.301.199.350,63
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	740.306.550.833,00	653.453.525.663,03	88,26	597.415.024.061,76
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.720.041.132.336,00	2.672.063.804.083,00	98,26	2.719.220.378.768,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	253.206.315.000,00	249.715.447.700,00	98,62	187.640.503.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.488.477.457.000,00	1.488.165.543.875,00	99,97	1.462.844.517.762,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	603.030.001.000,00	595.537.384.246,00	98,75	499.525.472.006,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2.344.713.773.000,00	2.333.418.375.821,00	99,51	2.150.010.492.768,00
4.2.01.05	Dana Desa	239.735.550.000,00	211.060.145.212,00	88,03	230.822.914.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	32.035.778.000,00	32.035.778.000,00	100,00	51.161.561.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	271.771.328.000,00	243.095.923.212,00	89,44	281.964.475.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.556.031.336,00	96.349.505.050,00	93,04	287.225.411.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	95.508.627.336,00	88.481.651.050,00	92,64	279.423.766.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	8.047.404.000,00	7.867.854.000,00	97,76	7.801.645.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	103.556.031.336,00	96.349.505.050,00	93,04	287.225.411.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.720.041.132.336,00	2.672.063.804.083,00	98,26	2.719.220.378.768,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51.248.741.993,00	78.116.954.558,77	152,42	53.562.245.792,32
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	2.040.524.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	51.248.741.993,00	78.116.954.558,77	152,42	50.712.721.792,32
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51.248.741.993,00	78.116.954.558,77	152,42	53.562.245.792,32
	JUMLAH PENDAPATAN	3.511.596.425.162,00	3.404.434.284.304,00	96,94	3.370.197.648.622,00
5	BELANJA DAERAH	3.970.908.205.886,88	3.373.086.493.912,08	84,94	3.317.227.539.469,30
5.1	BELANJA OPERASI	2.730.360.703.509,90	2.237.032.066.473,78	81,93	2.367.864.778.004,29
5.1.01	Belanja Pegawai	1.356.179.793.363,60	1.105.921.821.034,70	81,54	1.100.041.983.084,94
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.191.063.440.878,30	1.031.282.715.503,08	86,58	1.050.410.208.107,84
5.1.03	Belanja Bunga	7.795.188.268,00	4.987.797.536,00	63,98	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	159.281.956.000,00	81.187.293.400,00	50,97	205.907.856.811,51
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.040.325.000,00	13.652.439.000,00	85,11	11.504.730.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.730.360.703.509,90	2.237.032.066.473,78	81,93	2.367.864.778.004,29
5.2	BELANJA MODAL	791.194.316.976,98	715.978.209.050,30	90,49	527.806.884.865,01
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.742.343.458,00	111.947.206.464,00	90,46	104.425.641.308,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.903.141.886,17	130.421.905.095,22	72,90	74.502.642.875,44
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Laringan, dan Irigasi	482.306.323.732,81	469.890.834.610,08	97,42	347.087.558.331,57
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.177.698.900,00	1.280.364.000,00	58,79	1.555.803.450,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.064.809.000,00	2.437.898.881,00	59,97	235.238.900,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	791.194.316.976,98	715.978.209.050,30	90,49	527.806.884.865,01
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	19.559.660.853,00	97,79	465.328.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	19.559.660.853,00	97,79	465.328.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	19.559.660.853,00	97,79	465.328.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	429.353.184.600,00	408.516.557.535,00	95,15	421.090.548.600,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	15.402.671.500,00	15.402.671.500,00	100,00	15.402.671.500,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.791.288.100,00	4.791.288.100,00	100,00	4.791.288.100,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	409.159.225.000,00	388.322.597.935,00	94,91	400.896.589.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	429.353.184.600,00	408.516.557.535,00	95,15	421.090.548.600,00
	JUMLAH BELANJA	3.970.908.205.886,88	3.373.086.493.912,08	84,94	3.317.227.539.469,30

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	SURPLUS/DEFISIT	(459.311.779.924,88)	31.347.790.392,72	(6,82)	52.970.109.152,78
6	PEMBIAYAAN DAERAH	459.211.779.924,88	340.893.822.883,38	74,23	37.265.855.820,88
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	585.544.362.924,88	467.226.405.883,38	79,79	37.265.855.820,88
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.211.779.924,88	89.211.779.924,88	100,00	37.265.855.820,88
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	496.332.583.000,00	378.014.625.958,50	76,16	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	585.544.362.924,88	467.226.405.883,38	79,79	37.265.855.820,88
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	126.332.583.000,00	126.332.583.000,00	100,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	126.332.583.000,00	126.332.583.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	126.332.583.000,00	126.332.583.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	459.211.779.924,88	340.893.822.883,38	74,23	37.265.855.820,88
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(100.000.000,00)	372.241.613.276,10	(372,241,61)	90.235.964.973,66

Kab. Banyuwangi, 9 April 2026
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH**

CAHYANTO HENDRI WAHYUDI, SE
 NIP.197603102002121005

Laporan Realisasi BIPA4

KABUPATEN BANYUWANGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

PERIODE : 01 Januari 2025 - 31 Desember 2025

HAL: 1 / 5

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	740.306.550.833,00	767.440.204.961,30	27.133.654.128,30	103,67
4101	Pajak Daerah	375.065.550.833,00	456.189.263.047,00	81.123.712.214,00	121,63
410109	Pajak Reklame	4.625.000.000,00	5.583.143.265,00	958.143.265,00	120,72
410112	Pajak Air Tanah	3.650.000.000,00	6.478.647.322,00	2.828.647.322,00	177,50
410114	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	206.103.867,00	254.796.855,00	48.692.988,00	123,63
410115	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.000.000.000,00	58.319.730.299,00	(1.680.269.701,00)	97,20
410116	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51.100.000.000,00	59.757.712.020,00	8.657.712.020,00	116,94
410119	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	149.777.896.133,00	171.256.956.186,00	21.479.060.053,00	114,34
410120	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	62.891.577.168,00	104.518.568.600,00	41.626.991.432,00	166,19
410121	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	42.814.973.665,00	50.019.708.500,00	7.204.734.835,00	116,83
4102	Retribusi Daerah	305.954.314.200,00	273.270.826.148,66	(32.683.488.051,34)	89,32
410201	Retribusi Jasa Umum	271.359.516.199,00	252.774.844.866,15	(18.584.671.332,85)	93,15
410202	Retribusi Jasa Usaha	29.264.798.001,00	17.270.906.951,51	(11.993.891.049,49)	59,02
410203	Retribusi Perizinan Tertentu	5.330.000.000,00	3.225.074.331,00	(2.104.925.669,00)	60,51
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.950.000.000,00	24.945.876.115,94	(4.123.884,06)	99,98
410302	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	24.950.000.000,00	24.945.876.115,94	(4.123.884,06)	99,98
4104	Lain-lain PAD yang Sah	34.336.685.800,00	13.034.239.649,70	(21.302.446.150,30)	37,96
410401	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	162.610.670,00	285.612.140,00	123.001.470,00	175,64
410403	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.212.000.000,00	89.712.185,00	(2.122.287.815,00)	4,06
410405	Jasa Giro	6.520.000.000,00	1.407.581.890,71	(5.112.418.109,29)	21,59
410406	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	14.620.000,00	28.568.182,00	13.948.182,00	195,40
410407	Pendapatan Bunga	18.834.000.000,00	7.246.519.939,48	(11.587.480.060,52)	38,48
410408	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.219.292.825,00	1.183.588.437,64	(2.035.704.387,36)	36,77
410411	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	400.357.720,00	438.577.913,59	38.220.193,59	109,55

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
410412	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.020.071.087,00	1.775.902.604,40	(244.168.482,60)	87,91
410413	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	824.780,00	824.780,00	
410414	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	931.944.220,00	397.834.900,00	(534.109.320,00)	42,69
410415	Pendapatan dari Pengembalian	21.789.278,00	134.915.946,70	113.126.668,70	619,19
410421	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	44.600.730,18	44.600.730,18	
42	PENDAPATAN TRANSFER	2.720.041.132.336,00	2.755.297.519.483,00	35.256.387.147,00	101,30
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.616.485.101.000,00	2.576.514.299.033,00	(39.970.801.967,00)	98,47
420105	Dana Desa	239.735.550.000,00	211.060.145.212,00	(28.675.404.788,00)	88,04
420106	Insentif Fiskal	32.035.778.000,00	32.035.778.000,00	0,00	100,00
420107	Dana Bagi Hasil (DBH)	253.206.315.000,00	249.715.447.700,00	(3.490.867.300,00)	98,62
420108	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.488.477.457.000,00	1.488.165.543.875,00	(311.913.125,00)	99,98
420109	Dana Alokasi Khusus (DAK)	603.030.001.000,00	595.537.384.246,00	(7.492.616.754,00)	98,76
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.556.031.336,00	178.783.220.450,00	75.227.189.114,00	172,64
420201	Pendapatan Bagi Hasil	95.508.627.336,00	170.915.366.450,00	75.406.739.114,00	178,95
420202	Bantuan Keuangan	8.047.404.000,00	7.867.854.000,00	(179.550.000,00)	97,77
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51.248.741.993,00	78.116.954.558,77	26.868.212.565,77	152,43
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	51.248.741.993,00	78.116.954.558,77	26.868.212.565,77	152,43
430301	Lain-lain Pendapatan	0,00	28.595.625.742,77	28.595.625.742,77	
430302	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	51.248.741.993,00	49.521.328.816,00	(1.727.413.177,00)	96,63
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	3.511.596.425.162,00	3.600.854.679.003,07	89.258.253.841,07	102,54
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI	2.730.303.024.909,71	2.480.109.171.730,91	(250.193.853.178,80)	90,84
5101	Belanja Pegawai	1.356.179.793.363,60	1.237.495.122.110,08	(118.684.671.253,52)	91,25
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	859.117.717.723,39	763.438.538.047,00	(95.679.179.676,39)	88,86
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	448.224.146.832,21	429.222.502.913,08	(19.001.643.919,13)	95,76
510104	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.635.765.860,00	30.834.208.310,00	(1.801.557.550,00)	94,48
510105	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	914.042.948,00	866.057.856,00	(47.985.092,00)	94,75
510106	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	0,00	100,00
510199	Belanja Pegawai BLUD	14.295.000.000,00	12.140.694.984,00	(2.154.305.016,00)	84,93
5102	Belanja Barang dan Jasa	1.191.005.762.278,11	1.102.332.424.481,83	(88.673.337.796,28)	92,55
510201	Belanja Barang	236.595.917.856,74	212.706.730.761,00	(23.889.187.095,74)	89,90

Laporan Operasional SIPD



PEMERINTAHAN KAB. BANYUWANGI
LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	3.193.356.924.092,80	2.760.887.914.606,10	432.469.009.486,70	15,66
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	653.436.310.663,03	472.051.398.349,30	181.384.912.313,73	38,42
7.1.01	Pajak Daerah-LO	343.887.101.608,00	301.490.644.366,00	42.396.457.242,00	14,06
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	273.316.828.780,66	127.208.687.179,81	146.108.141.600,85	114,86
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	24.945.876.115,94	27.873.107.497,21	(2.927.231.381,27)	(10,50)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	11.286.504.158,43	15.478.959.306,28	(4.192.455.147,85)	(27,08)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	653.436.310.663,03	472.051.398.349,30	181.384.912.313,73	38,42
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	2.461.803.658.871,00	2.147.882.831.768,00	313.920.827.103,00	14,62
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.365.454.153.821,00	2.140.081.186.768,00	225.372.967.053,00	10,53
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	0,00	2.088.919.625.768,00	(2.088.919.625.768,00)	(100,00)
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	159.098.144.000,00	(159.098.144.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	1.430.296.009.762,00	(1.430.296.009.762,00)	(100,00)
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	57.922.959.174,00	(57.922.959.174,00)	(100,00)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	441.602.512.832,00	(441.602.512.832,00)	(100,00)
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	249.715.447.700,00	0,00	249.715.447.700,00	100,00
7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.488.165.543.875,00	0,00	1.488.165.543.875,00	100,00
7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	595.537.384.246,00	0,00	595.537.384.246,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	2.333.418.375.821,00	2.088.919.625.768,00	244.498.750.053,00	11,70
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	32.035.778.000,00	51.161.561.000,00	(19.125.783.000,00)	(37,38)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	32.035.778.000,00	51.161.561.000,00	(19.125.783.000,00)	(37,38)
7.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	96.349.505.050,00	7.801.645.000,00	88.547.860.050,00	1.134,99
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	88.481.651.050,00	0,00	88.481.651.050,00	100,00
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.867.854.000,00	7.801.645.000,00	66.209.000,00	0,85
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	96.349.505.050,00	7.801.645.000,00	88.547.860.050,00	1.134,99
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	2.461.803.658.871,00	2.147.882.831.768,00	313.920.827.103,00	14,62
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	78.116.954.558,77	140.953.684.488,80	(62.836.729.930,03)	(44,58)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	90.240.962.696,48	(90.240.962.696,48)	(100,00)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	78.116.954.558,77	50.712.721.792,32	27.404.232.766,45	54,04
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	78.116.954.558,77	140.953.684.488,80	(62.836.729.930,03)	(44,58)
	JUMLAH PENDAPATAN	3.193.356.924.092,80	2.760.887.914.606,10	432.469.009.486,70	15,66
8	BEBAN	2.446.043.840.886,78	3.104.450.474.874,27	(658.406.633.987,49)	(21,21)
8.1	BEBAN OPERASI	2.237.027.767.710,78	2.281.536.057.817,21	(44.508.290.106,43)	(1,95)
8.1.01	Beban Pegawai	1.105.917.522.271,70	1.081.150.460.453,02	24.767.061.818,68	2,29
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.031.282.715.503,08	999.851.036.122,15	31.431.679.380,93	3,14
8.1.03	Beban Bunga	4.987.797.536,00	0,00	4.987.797.536,00	100,00
8.1.05	Beban Hibah	81.187.293.400,00	177.334.059.532,51	(96.146.766.132,51)	(54,22)

Laporan Operasional BIPA4

KABUPATEN BANYUWANGI
LAPORAN OPERASIONAL ANGGARAN PEMDA
TAHUN ANGGARAN 2025

PERIODE : 01 Januari 2025 - 31 Desember 2025

HAL: 1 / 2

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN DAERAH-LO				
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
7101	Pajak Daerah-LO	473.017.174.417,00	301.490.644.366,00	171.526.530.051,00	56,89
7102	Retribusi Daerah-LO	253.218.680.401,96	265.518.157.434,96	(12.299.477.033,00)	(4,63)
7103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	28.876.663.151,88	27.873.107.497,21	1.003.555.654,67	3,60
7104	Lain-lain PAD yang Sah-LO	22.926.520.493,91	20.332.349.720,21	2.594.170.773,70	12,76
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	778.039.038.464,75	615.214.259.018,38	162.824.779.446,37	26,47
72	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
7201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO				
720101	Dana Perimbangan-LO	2.030.008.716.921,00	2.088.919.625.768	(58.910.908.847,00)	(2,82)
720106	Insentif Fiskal - LO	32.035.778.000,00	51.161.561.000,00	(19.125.783.000,00)	(37,38)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.062.044.494.921,00	2.140.081.186.768,00	(78.036.691.847,00)	(3,65)
7202	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO				
720201	Pendapatan Bagi Hasil-LO	170.915.366.450,00	279.423.766.000,0	(108.508.399.550,0)	(38,83)
720202	Bantuan Keuangan	7.867.854.000,00	7.801.645.000,00	66.209.000,00	0,85
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	178.783.220.450,00	287.225.411.000,00	(108.442.190.550,00)	(37,76)
	Jumlah PENDAPATAN TRANSFER-LO	2.240.827.715.371,00	2.427.306.597.768,00	(186.478.882.397,00)	(7,68)
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
7301	Pendapatan Hibah-LO	105.116.541.902,27	91.206.451.444,48	13.910.090.457,79	15,25
7303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	78.116.954.558,77	50.712.721.792,32	27.404.232.766,45	54,04
	Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	183.233.496.461,04	141.919.173.236,80	41.314.323.224,24	29,11
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	3.202.100.250.296,79	3.184.440.030.023,18	17.660.220.273,61	0,55
8	BEBAN DAERAH				
81	BEBAN OPERASI				
8101	Beban Pegawai	953.877.331.122,70	1.091.432.192.482,7	(137.554.861.360,02)	(12,60)
8102	Beban Barang dan Jasa	1.090.423.782.411,34	1.055.582.601.857,3	34.841.180.554,04	3,30
8103	Beban Bunga	4.987.797.536,00	0,00	4.987.797.536,00	
8105	Beban Hibah	209.659.847.618,67	254.498.062.355,51	(44.838.214.736,84)	(17,62)
8106	Beban Bantuan Sosial	13.652.439.000,00	11.504.730.000,00	2.147.709.000,00	18,67
8107	Beban Penyisihan Piutang	17.444.520.907,12	21.482.495.915,07	(4.037.975.007,95)	(18,80)
	Jumlah BEBAN OPERASI	2.290.045.718.595,83	2.434.500.082.610,60	(144.454.364.014,77)	(5,93)
82	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	134.298.163.210,87	122.128.916.751,12	12.169.246.459,75	9,96
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	84.321.511.562,82	82.546.659.566,11	1.774.851.996,71	2,15
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	420.608.797.720,74	422.408.207.493,88	(1.799.409.773,14)	(0,43)
8204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.022.645.085,08	1.070.432.749,08	(47.787.664,00)	(4,46)

PERIODE : 01 Januari 2025 - 31 Desember 2025

HAL: 2 / 2

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
8205	Beban Penyusutan Aset Lainnya	535.978.792,12	730.705.740,15	(194.726.948,03)	(26,65)
8206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.312.417.916,50	1.307.071.495,30	5.346.421,20	0,41
8207	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.789.211.679,26	1.789.211.679,26	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	643.888.725.967,39	631.981.205.474,90	11.907.520.492,49	1,88
85	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
8501	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	28.526.115.440,62	11.293.252.142,29	17.232.863.298,33	152,59
	Jumlah DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	28.526.115.440,62	11.293.252.142,29	17.232.863.298,33	152,59
	Jumlah BEBAN DAERAH	2.962.460.560.003,84	3.077.774.540.227,79	(115.313.980.223,94)	(3,75)
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	239.639.690.292,95	106.665.489.795,39	132.974.200.497,56	124,66
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
74	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO				
7401	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	NaN
7402	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	NaN
7403	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO	4.801.735.224,00	0,00	4.801.735.224,00	
	Jumlah SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	4.801.735.224,00	0,00	4.801.735.224,00	
83	BEBAN TRANSFER				
8301	Beban Bagi Hasil	20.193.959.600,00	20.193.959.600,00	0,00	0,00
8302	Beban Bantuan Keuangan	169.262.452.723,00	0,00	169.262.452.723,00	
	Jumlah BEBAN TRANSFER	189.456.412.323,00	20.193.959.600,00	169.262.452.723,00	838,18
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(184.654.677.099,00)	(20.193.959.600,00)	(164.460.717.499,00)	814,41
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	54.985.013.193,95	86.471.530.195,39	(31.486.517.001,44)	(36,41)
	POS LUAR BIASA				
84	BEBAN TAK TERDUGA				
8401	Beban Tak Terduga	277.355.096,00	378.138.200,00	(100.783.104,00)	(26,65)
	Jumlah BEBAN TAK TERDUGA	277.355.096,00	378.138.200,00	(100.783.104,00)	(26,65)
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	(277.355.096,00)	(378.138.200,00)	100.783.104,00	(26,65)
	SURPLUS / DEFISIT LO	54.707.658.097,95	86.093.391.995,39	(31.385.733.897,44)	(36,46)

30 April 2025

P P K D

Laporan Perubahan Ekuitas SIPD



PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI
KONSOLIDASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	4.166.725.236.416,34	4.315.949.108.444,81
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	747.313.083.206,02	(345.990.282.256,34)
RK PPKD	2.485.898.472.030,20	325.926.123.968,47
RK SKPD	(2.369.649.130.586,20)	(229.337.593.135,26)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	(636.131.588,94)
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	353.995.100,00
LAIN-LAIN	0,00	100.460.015.883,60
EKUITAS AKHIR	5.030.287.661.066,36	4.166.725.236.416,34

Kab. Banyuwangi, 9 April 2026
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

CAHYANTO HENDRI WAHYUDI, SE
NIP.197603102002121005

Laporan Perubahan Ekuitas BIPA4

**- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS -
KABUPATEN BANYUWANGI
01 Januari 2025 - 31 Desember 2025**

JENIS AKRUAL

HAL: 1 / 1

No	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Ekuitas Awal	4.855.313.471.783,33	4.841.835.562.924,75
2	Surplus / Defisit LO	54.707.658.097,95	(83.980.283.004,60)
3	RK - PPKD	557.051.947.403,26	229.337.593.135,26
4	RK - SKPD	(557.051.947.403,26)	(229.337.593.135,26)
5	Koreksi Nilai Kas Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
6	Koreksi Nilai Piutang Tahun Sebelumnya	(445.560.647,55)	(35.447.049,16)
7	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	0,00	5.078.488,78
8	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
9	Koreksi Nilai Persediaan Tahun Sebelumnya	1.157.200,00	11.326.097,94
10	Koreksi Nilai Investasi Non Permanen Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
11	Koreksi Nilai Investasi Permanen Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
12	Koreksi Nilai Dana Bergulir Tak Tertagih Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
13	Koreksi Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya	0,00	98.590.741.448,61
14	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Sebelumnya	(169.919.851,23)	1.638.718.834,11
15	Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
16	Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun Sebelumnya	0,00	(30.030.000,00)
17	Koreksi Nilai Aset Lainnya Tahun Sebelumnya	0,00	57.199.558,36
18	Koreksi Nilai Kewajiban Jangka Pendek Tahun Sebelumnya	(1.891.318,64)	(3.019.038.851,50)
19	Koreksi Nilai Kewajiban Jangka Panjang Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
20	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	443.336,00
21	Koreksi Nilai Properti Investasi	0,00	239.200.000,00
22	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR		4.909.404.915.263,86	4.855.313.471.783,29

30 April 2025

P P K D

CAHYANTO HENDRI WAHYUDI, SE

197603102002121005

Laporan Arus Kas SIPD



PEMERINTAHAN KAB. BANYUWANGI
NERACA (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	8.121.179.473.623,59	7.005.933.723.575,07
1.1	ASET LANCAR	647.442.797.860,34	248.175.256.862,12
1.1.01	Kas dan Setara Kas	488.591.990.185,10	89.307.199.186,88
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	327.841.763.254,04	53.528.690.247,77
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	221.887.167.530,49	90.606.547,14
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.887.912.163,00	9.864,70
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	(194.027.362.482,15)	22.173.505.218,41
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	872.917.761,88	9.855.596.725,88
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	511.978.211,40	96.728.211,40
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	115.562.623.880,44	184.757.314,58
1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	8.054.989.866,00	3.377.305.057,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	98.401.721.702,81	98.401.721.702,81
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	25.752.797.595,75	25.752.797.595,75
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	36.976.997.535,29	36.976.997.535,29
1.1.09	Piutang Lainnya	9.160.990.364,92	9.178.240.364,92
1.1.10	Penyisihan Piutang	(123.460.000.172,41)	(123.460.000.172,41)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	1.165.557.253,75	1.165.557.253,75
1.1.12	Persediaan	110.852.743.395,13	110.852.743.395,13
	JUMLAH ASET LANCAR	647.442.797.860,34	248.175.256.862,12
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	249.089.272.297,18	249.089.272.297,18
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	249.089.272.297,18	249.089.272.297,18
1.2.02.01	Penyertaan Modal	249.089.272.297,18	249.089.272.297,18
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	249.089.272.297,18	249.089.272.297,18
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	249.089.272.297,18	249.089.272.297,18
1.3	ASET TETAP	6.839.407.281.066,53	6.125.866.970.897,23
1.3.01	Tanah	1.086.395.514.771,57	1.086.395.514.771,57
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.647.375.385.709,39	1.535.428.179.245,39
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.620.433.255.720,62	2.490.011.350.625,40
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.588.307.098.054,69	6.118.416.263.444,61
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	29.324.788.094,30	28.044.424.094,30
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.722.247.182,21	20.722.247.182,21
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.153.151.008.466,25)	(5.153.151.008.466,25)
	JUMLAH ASET TETAP	6.839.407.281.066,53	6.125.866.970.897,23
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	248.571.503.281,86	246.133.604.400,86
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	163.867.039.851,56	163.867.039.851,56
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	18.537.101.814,90	16.099.202.933,90
1.5.04	Aset Lain-lain	79.563.573.903,41	79.563.573.903,41
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(13.396.212.288,01)	(13.396.212.288,01)
	JUMLAH ASET LAINNYA	248.571.503.281,86	246.133.604.400,86
1.6	PROPERTI INVESTASI	136.668.619.117,68	136.668.619.117,68
1.6.01	Properti Investasi Tanah	150.194.906.290,49	150.194.906.290,49
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(13.417.099.884,49)	(13.417.099.884,49)
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(109.187.288,32)	(109.187.288,32)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	136.668.619.117,68	136.668.619.117,68
	JUMLAH ASET	8.121.179.473.623,59	7.005.933.723.575,07
2	KEWAJIBAN	453.099.637.085,14	201.417.594.126,64
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	200.438.099.754,14	201.417.594.126,64
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	95.419.262,00	95.419.262,00
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	(979.494.372,50)	0,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	561.904.854,81	561.904.854,81

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2.1.06	Utang Belanja	200.112.028.112,83	200.112.028.112,83
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	648.241.897,00	648.241.897,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	200.438.099.754,14	201.417.594.126,64
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	252.661.537.331,00	0,00
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	252.661.537.331,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	252.661.537.331,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	453.099.637.085,14	201.417.594.126,64
3	EKUITAS	5.030.287.661.066,36	4.166.725.236.416,34
3.1	EKUITAS	5.030.287.661.066,36	4.166.725.236.416,34
	JUMLAH EKUITAS	5.030.287.661.066,36	4.166.725.236.416,34
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.483.387.298.151,50	4.368.142.830.542,98

Kab. Banyuwangi, 9 April 2026
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**

CAHYANTO HENDRI WAHYUDI, SE
NIP.197603102002121005

Neraca SIPD



PEMERINTAHAN KAB. BANYUWANGI
NERACA (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	8.121.179.473.623,59	7.005.933.723.575,07
1.1	ASET LANCAR	647.442.797.860,34	248.175.256.862,12
1.1.01	Kas dan Setara Kas	488.591.990.185,10	89.307.199.186,88
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	327.841.763.254,04	53.528.690.247,77
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	221.887.167.530,49	90.606.547,14
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.887.912.163,00	9.864,70
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	(194.027.362.482,15)	22.173.505.218,41
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	872.917.761,88	9.855.596.725,88
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	511.978.211,40	96.728.211,40
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	115.562.623.880,44	184.757.314,58
1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	8.054.989.866,00	3.377.305.057,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	98.401.721.702,81	98.401.721.702,81
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	25.752.797.595,75	25.752.797.595,75
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	36.976.997.535,29	36.976.997.535,29
1.1.09	Piutang Lainnya	9.160.990.364,92	9.178.240.364,92
1.1.10	Penyisihan Piutang	(123.460.000.172,41)	(123.460.000.172,41)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	1.165.557.253,75	1.165.557.253,75
1.1.12	Persediaan	110.852.743.395,13	110.852.743.395,13
	JUMLAH ASET LANCAR	647.442.797.860,34	248.175.256.862,12
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	249.089.272.297,18	249.089.272.297,18
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	249.089.272.297,18	249.089.272.297,18
1.2.02.01	Penyertaan Modal	249.089.272.297,18	249.089.272.297,18
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	249.089.272.297,18	249.089.272.297,18
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	249.089.272.297,18	249.089.272.297,18
1.3	ASET TETAP	6.839.407.281.066,53	6.125.866.970.897,23
1.3.01	Tanah	1.086.395.514.771,57	1.086.395.514.771,57
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.647.375.385.709,39	1.535.428.179.245,39
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.620.433.255.720,62	2.490.011.350.625,40
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.588.307.098.054,69	6.118.416.263.444,61
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	29.324.788.094,30	28.044.424.094,30
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.722.247.182,21	20.722.247.182,21
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.153.151.008.466,25)	(5.153.151.008.466,25)
	JUMLAH ASET TETAP	6.839.407.281.066,53	6.125.866.970.897,23
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	248.571.503.281,86	246.133.604.400,86
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	163.867.039.851,56	163.867.039.851,56
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	18.537.101.814,90	16.099.202.933,90
1.5.04	Aset Lain-lain	79.563.573.903,41	79.563.573.903,41
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(13.396.212.288,01)	(13.396.212.288,01)
	JUMLAH ASET LAINNYA	248.571.503.281,86	246.133.604.400,86
1.6	PROPERTI INVESTASI	136.668.619.117,68	136.668.619.117,68
1.6.01	Properti Investasi Tanah	150.194.906.290,49	150.194.906.290,49
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(13.417.099.884,49)	(13.417.099.884,49)
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(109.187.288,32)	(109.187.288,32)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	136.668.619.117,68	136.668.619.117,68
	JUMLAH ASET	8.121.179.473.623,59	7.005.933.723.575,07
2	KEWAJIBAN	453.099.637.085,14	201.417.594.126,64
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	200.438.099.754,14	201.417.594.126,64
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	95.419.262,00	95.419.262,00
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	(979.494.372,50)	0,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	561.904.854,81	561.904.854,81

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2.1.06	Utang Belanja	200.112.028.112,83	200.112.028.112,83
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	648.241.897,00	648.241.897,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	200.438.099.754,14	201.417.594.126,64
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	252.661.537.331,00	0,00
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	252.661.537.331,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	252.661.537.331,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	453.099.637.085,14	201.417.594.126,64
3	EKUITAS	5.030.287.661.066,36	4.166.725.236.416,34
3.1	EKUITAS	5.030.287.661.066,36	4.166.725.236.416,34
	JUMLAH EKUITAS	5.030.287.661.066,36	4.166.725.236.416,34
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.483.387.298.151,50	4.368.142.830.542,98

Kab. Banyuwangi, 9 April 2026
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

CAHYANTO HENDRI WAHYUDI, SE
NIP.197603102002121005

NERACA
KABUPATEN BANYUWANGI
01 Januari 2025 - 31 Desember 2025

JENIS AKRUAL

HAL: 1 / 3

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
1101	Kas dan Setara Kas				
110101	Kas di Kas Daerah	280.480.401.953,57	53.528.690.247,77	226.951.711.705,80	423,98
110102	Kas di Bendahara Penerimaan	67.429.113,25	90.606.547,14	(23.177.433,89)	(25,58)
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	(0,00)	9.864,70	(9.864,70)	(100,00)
110104	Kas di BLUD	27.962.062.322,27	22.173.505.218,41	5.788.557.103,86	26,11
110105	Kas Dana BOS	216.983.726,84	184.757.314,58	32.226.412,26	17,44
110106	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	10.235.043.223,87	9.855.596.725,88	379.446.497,99	3,85
110107	Kas lainnya	62.132.217,39	96.728.211,40	(34.595.994,01)	(35,77)
110108	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
110109	Kas Dana BOK Puskesmas	925.290.868,00	3.377.305.057,00	(2.452.014.189,00)	(72,60)
110201	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Piutang Pajak Daerah	116.551.961.648,81	100.448.276.946,81	16.103.684.702,00	16,03
110401	Piutang Retribusi Daerah	5.540.356.177,87	25.752.797.595,75	(20.212.441.417,88)	(78,49)
110501	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
110601	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	40.601.499.266,92	36.976.997.535,29	3.624.501.731,63	9,80
110701	Piutang Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
110901	Piutang Lainnya	8.663.718.521,92	9.178.240.364,92	(514.521.843,00)	(5,61)
111001	Penyisihan Piutang	(95.844.143.155,01)	(85.857.989.103,42)	(9.986.154.051,59)	11,63
111101	Beban Dibayar Dimuka	2.599.711.842,17	1.165.557.253,75	1.434.154.588,42	123,04
111201	Persediaan	79.580.304.782,39	110.875.777.195,14	(31.295.472.412,75)	(28,23)
1113	Aset Untuk Dikonsolidasikan				
111301	RK SKPD	557.051.947.403,25	0,00	557.051.947.403,25	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.034.694.699.913,51	287.846.856.975,12	746.847.842.938,39	259,46
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1201	Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
120105	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
120106	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00
120107	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Investasi Jangka Panjang Permanen				
120201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	253.020.059.333,12	249.089.272.297,18	3.930.787.035,94	1,58
120202	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	253.020.059.333,12	249.089.272.297,18	3.930.787.035,94	1,58
13	ASET TETAP				

JENIS AKRUAL

HAL: 2 / 3

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah	%
1301	ASET TETAP				
130101	Tanah	1.076.044.250.774,02	1.094.168.598.971,57	(18.124.348.197,55)	(1,66)
130201	Peralatan dan Mesin	1.653.936.923.613,50	1.551.860.463.678,54	102.076.459.934,96	6,58
130301	Gedung dan Bangunan	2.622.487.602.393,87	2.512.201.035.960,18	110.286.566.433,69	4,39
130401	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.469.469.943.443,30	6.118.793.511.845,54	350.676.431.597,76	5,73
130501	Aset Tetap Lainnya	28.756.213.844,30	28.050.424.094,30	705.789.750,00	2,52
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.430.862.962,89	20.722.247.182,21	22.708.615.780,68	109,59
130701	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.698.221.510.646,98)	(7.094.402.032.313,80)	(603.819.478.333,18)	8,51
	JUMLAH ASET TETAP	4.195.904.286.384,90	4.231.394.249.418,54	(35.489.963.033,64)	(0,84)
14	DANA CADANGAN				
1401	Dana Cadangan				
140101	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ASET LAINNYA				
1501	ASET LAINNYA				
150102	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
150201	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	163.867.039.851,56	163.867.039.851,56	0,00	0,00
150301	Aset Tidak Berwujud	18.373.925.714,90	16.240.835.833,90	2.133.089.881,00	13,13
150401	Aset Lain-lain	54.632.969.973,39	80.850.553.501,42	(26.217.583.528,03)	(32,43)
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15.200.945.924,51)	(13.888.528.008,01)	(1.312.417.916,50)	9,45
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	221.672.989.615,34	247.069.901.178,87	(25.396.911.563,53)	(10,28)
16	PROPERTI INVESTASI				
1601	Properti Investasi				
160101	Properti Investasi	169.939.794.251,03	150.724.440.390,49	19.215.353.860,54	12,75
1602	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi				
160201	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(17.448.448.972,07)	(15.659.237.292,81)	(1.789.211.679,26)	11,43
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	152.491.345.278,96	135.065.203.097,68	17.426.142.181,28	12,90
	JUMLAH ASET	5.857.783.380.525,83	5.150.465.482.967,38	707.317.897.558,45	13,73
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2101	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
210101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	60.959.661,00	95.419.262,00	(34.459.601,00)	(36,11)
210201	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
210302	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
210401	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	68.416.067.560,00	0,00	68.416.067.560,00	0,00
210501	Pendapatan Diterima Dimuka	773.210.975,63	561.904.854,81	211.306.120,82	37,61
210601	Utang Belanja	129.994.289.519,73	290.649.064.725,08	(160.654.775.205,35)	(55,27)
210701	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.921.226.438,00	3.845.622.342,00	75.604.096,00	1,97

Lampiran 6 *Photo Copy* Kartu konsultasi dan bimbingan PKN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Buni Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331 – 337990 Faksimile 0331 – 332150
Email : feb@unej.ac.id Website: www.feb.unej.ac.id

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN TUGAS AKHIR PKN PROGRAM AHLI MADYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

1. NAMA : Tria Yuniar Pratiwi
2. NIM : 230803104023
3. PROGRAM STUDI : D3 Akuntansi
4. JUDUL PKN : Perbandingan Penggunaan SIPD dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi di
BPKAD Kabupaten Banyuwangi
5. PEMBIMBING : Taufik Kurrohman, SE., MSA, Ak. Ph. D
6. TGL. PERSETUJUAN : 06 Februari 2026

NO	TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN
			PEMBIMBING
1	06 Feb 2026	Bimbingan judul pkr	
2	10 Feb 2026	ACC Judul	
3	07 Mar 2026	Bimbingan Bab 1-3	
4	06 Apr 2026	Bimbingan Bab 4	
5	10 Apr 2026	Bimbingan Bab 1-5	
6	18 Apr 2026	Bimbingan Revisi Bab 1-5	
7	20 Apr 2026	Bimbingan lampiran	
8	21 April 2026	Bimbingan Bab 1 - lampiran	






Mengetahui/Menyetujui
Koordinator Program
Studi D3 Akuntansi.





Moch. Shulthoni, S.E, MSA., CSRS,
CSRA NIP. 198007072015041002







Lampiran 7 Bukti Logbook Kegiatan

LOGBOOK KEGIATAN
MAGANG PKN 2025

No.	Tanggal Pelaksanaan	Dokumentasi Kegiatan	Ringkasan Catatan Harian	Tandatangan Supervisor Lapang
1.	02 Feb – 03 Feb		Pengenalan lingkungan BPKAD bidang anggaran dan akuntansi	
2.	04 Feb – 06 Feb		<ul style="list-style-type: none"> • Dijelaskan secara umum mengenai tugas dan fungsi BPKAD • Penjelasan sistem yang digunakan di BPKAD 	
3.	09 Feb – 13 Feb		Melakukan perhitungan dan pengecekan ulang CALK dari sistem	
4.	16 Feb – 17 Feb		Cuti bersama tahun baru Imlek	
5.	18 Feb		Mengikuti acara kenal pamt dengan Kepala BPKAD, dan pejabat struktural	
6.	19 Feb – 27 Feb		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perhitungan buku besar DAK nonfisik • Mengumpulkan data sekolah SD & SMP dari sistem untuk di rekonsiliasi 	

No.	Tanggal Pelaksanaan	Dokumentasi Kegiatan	Ringkasan Catatan Harian	Tantangan Supervisor Lapangan
7.	02 Mar – 06 Mar		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan posting jurnal di sistem SIPD Mencocokkan PAD dari sistem SIPD dan BIPA4 	
8.	09 Mar – 13 Mar		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi dan analisis selisih data antara SIPD dan BIPA4 Melakukan identifikasi selisih LRA belanja dan pendapatan 	
9.	16 Mar – 17 Mar		Melakukan identifikasi jurnal yang belum terposting di sistem SIPD	
10.	18 Mar – 24 Mar		Cuti bersama nyepi dan Hari raya Idul fitri	
11.	25 Mar – 27 Mar		<ul style="list-style-type: none"> Menginput data pembayaran utang obat rumah sakit Menginput data pembayaran utang PT/CV 	

No.	Tanggal Pelaksanaan	Dokumentasi Kegiatan	Ringkasan Catatan Harian	Tandatangan Supervisor Lapang
12.	30 Mar – 02 Apr		<ul style="list-style-type: none"> • Merekonsiliasi data anggaran bos SD dari data pendukung ke excel • Melakukan Posting Jurnal ke Sistem SIPD terkait dengan PAD • Melakukan Posting Jurnal di SIPD terkait Realisasi SKPD 	
13.	06 Apr – 10 Apr		Merekonsiliasi data anggaran BOS Tahun 2026 di sejumlah SD Kabupaten Banyuwangi	
14.	13 Apr – 17 Apr		Merekap Realisasi Anggaran Triwulan I reguler SD yang sesuai dengan dokumen	
15.	20 Apr – 24 Apr		<ul style="list-style-type: none"> • Membantu rekonsiliasi data di BIPA4 • Merekap Realisasi Anggaran Triwulan I reguler SMP yang disesuaikan dengan dokumen 	

Mengetahui
Pembimbing Lapangan



Eka Elmi Hikmawati, S.A
NIP 19960323 202521 2 002